

Kriminalitas di Tengah Pertumbuhan: Paradoks
Ekonomi dan Sosial di Kabupaten/Kota Aceh

Helmi Jazila¹, Zahriatul Aini^{2*}

¹ Program Studi Manajemen Keuangan sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Kota
Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

^{2*} Program Studi Administrasi Perkantoran, Politeknik Kutaraja, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh, Indonesia.

Email : helmijazyla@gmail.com¹, zahriatulaini@poltekkutaraja.ac.id^{2*}

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2022. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dan metode regresi Fixed Effect Model (FEM), hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, yang menandakan bahwa pertumbuhan yang tidak merata dapat meningkatkan tekanan sosial. Sementara itu, tingkat pengangguran justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas, diduga karena peran kuat jaringan sosial, bantuan pemerintah, serta dominasi sektor informal di Aceh. Ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual. Dengan memperkuat modal sosial, memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak, dan memastikan pemerataan hasil pembangunan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menurunkan angka kriminalitas sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh melalui terciptanya rasa aman, stabilitas sosial, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kriminalitas; Pertumbuhan Ekonomi; Pengangguran; Ketimpangan Pendapatan; Paradoks Sosial.

Abstract. This study aims to analyze the influence of economic growth, unemployment rate, and income inequality on crime rates across 23 regencies/cities in Aceh Province during the 2020–2022 period. Using a quantitative approach with panel data and the Fixed Effect Model (FEM) regression method, the results show that economic growth (measured by GRDP per capita) has a positive and significant effect on crime rates, indicating that uneven growth can increase social tension. Meanwhile, the unemployment rate has a negative and significant effect on crime, possibly due to the strong role of social networks, government assistance, and the dominance of the informal sector in Aceh. Income inequality (measured by the Gini Ratio) was found to have no significant effect on crime levels. These findings provide critical insights for designing more inclusive, equitable, and context-specific development policies. By strengthening social capital, expanding access to decent employment, and ensuring equitable development outcomes, the results of this study offer a strategic foundation for reducing crime rates while improving the quality of life in Aceh through enhanced public safety, social stability, and sustainable well-being.

Keywords: Crime; Economic Growth; Unemployment; Income Inequality; Social Paradox.

Pendahuluan

Era globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ideologi, sosial, ekonomi, seni, etika, dan moral. Perubahan ini tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga negatif, terutama terkait dengan perilaku manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.* (2020) menunjukkan bahwa perubahan ini mempengaruhi perilaku individu, yang dalam beberapa kasus dapat memicu tindakan kriminal. Kriminalitas, yang berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan atau tindak kriminal, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau komunitas yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian secara psikologis maupun ekonomi (Aditama, 2021). Tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, penodongan, dan pembegalan sering terjadi di masyarakat, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan dapat berakibat pada korban jiwa. Peningkatan angka kriminalitas diyakini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Penelitian Silvia & Ikhsan (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah dapat diukur dengan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun di Provinsi Aceh terdapat beberapa indikator ekonomi yang mengarah pada potensi pertumbuhan, pengangguran tetap menjadi masalah utama yang membutuhkan perhatian serius.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,56% pada bulan Februari dan sedikit meningkat menjadi 5,75% pada bulan Agustus. Meskipun angka ini fluktuatif, tingginya tingkat pengangguran mencerminkan kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Ketidakmampuan dalam menyerap tenaga kerja secara maksimal dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan ketegangan sosial dan berpotensi memacu kenaikan angka kriminalitas di wilayah tersebut (BPS, 2024). Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya

memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, mempengaruhi tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh. Dengan mengetahui hubungan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi angka kriminalitas melalui peningkatan kondisi ekonomi dan sosial. Penelitian ini juga memiliki manfaat signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, sehingga meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran akan pentingnya pembangunan ekonomi yang merata. Bagi pemerintah, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi pengangguran dan ketimpangan pendapatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan angka kriminalitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji pengaruh variabel ekonomi terhadap kriminalitas, tetapi juga untuk mengungkap dinamika sosial yang dapat menimbulkan paradoks antara teori ekonomi dan realitas sosial di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih tepat guna dalam mengurangi angka kriminalitas.

Tinjauan Literatur

Hubungan Ekonomi dan Kriminalitas

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow yang dijelaskan dalam penelitian Purwanti & Widyaningsih (2019), faktor-faktor seperti investasi, tabungan, dan pertumbuhan populasi berperan penting dalam menentukan tingkat output ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi investasi dan tabungan, semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat tercapai. Namun, dalam konteks kriminalitas, teori ini perlu dikombinasikan dengan teori ekonomi kejahatan oleh Becker (dalam Elias *et al.*, 2019), yang menyatakan bahwa individu akan memilih untuk melakukan tindakan kriminal apabila hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian, baik

dalam bentuk hukuman maupun risiko lainnya. Penelitian Silvia & Ikhsan (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yang dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika PDRB meningkat, pendapatan masyarakat cenderung lebih stabil, yang akan mengurangi kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan kriminal. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi tidak merata, ketimpangan pendapatan dapat memperburuk situasi sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas.

Pengangguran dan Kriminalitas

Pengangguran sering dikaitkan dengan peningkatan angka kriminalitas. Menurut Saputra (2023), individu yang menganggur memiliki peluang yang lebih sedikit untuk mendapatkan penghasilan yang sah, sehingga tekanan ekonomi dapat mendorong mereka untuk mencari alternatif melalui aktivitas ilegal. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dapat memperburuk ketegangan sosial dan mengurangi kohesi sosial dalam masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya tindakan kriminal. Penelitian lain oleh Kasim & Hendra (2023) juga menunjukkan bahwa pengangguran yang berkepanjangan dapat menyebabkan frustrasi sosial yang akhirnya memicu tindak kriminal, baik dalam bentuk pencurian, perampokan, atau kejahatan lainnya. Oleh karena itu, pengurangan tingkat pengangguran dapat menjadi salah satu strategi utama dalam menekan angka kriminalitas di suatu wilayah.

Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas

Ketimpangan pendapatan semakin mendapatkan perhatian dalam studi ekonomi dan sosial. Penelitian oleh Syarifah & Hasri (2024) menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpuasan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kriminalitas. Ketimpangan ekonomi yang signifikan dapat menyebabkan individu yang berada di lapisan bawah merasa termarginalkan, sehingga mereka menjadi lebih rentan melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk perlawanan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam penelitian Wahyu *et al.* (2021), dijelaskan bahwa

pada periode 2014-2019 di Pulau Jawa, ketimpangan ekonomi menjadi faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas dibandingkan dengan faktor lainnya. Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa distribusi pendapatan dilakukan secara adil untuk mengurangi ketimpangan dan menekan angka kriminalitas.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Aceh.
- H2: Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Aceh.
- H2: Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Aceh.

Dengan menguji hipotesis-hipotesis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Aceh, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi pemerintah daerah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2022. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, dan tingkat kriminalitas. Data yang telah dikumpulkan disusun dalam format panel data, yang menggabungkan data time-series (tahun 2020-2022) dan cross-section dari 23 kabupaten/kota, yang memungkinkan analisis yang lebih komprehensif. Analisis dilakukan dengan metode regresi data panel karena metode ini menggabungkan dimensi lintas waktu dan lintas entitas, sehingga

menghasilkan estimasi yang lebih efisien dan informatif. Model ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi terhadap tingkat kriminalitas antar daerah dan antar waktu. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kriminalitas, yang diukur berdasarkan jumlah kasus kriminal per 100.000 penduduk per tahun. Variabel independen terdiri atas pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran yang diukur dengan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini. Sebelum melakukan estimasi model, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan keandalan model, meliputi uji multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Pagan test, uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson test, serta uji normalitas residual dengan Jarque-Bera test. Setelah semua uji asumsi klasik dilakukan dan tidak ditemukan pelanggaran signifikan, estimasi model dilakukan menggunakan teknik Fixed Effects Model (FEM) atau Random Effects Model (REM), yang dipilih berdasarkan hasil uji Hausman.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Statistik Deskriptif

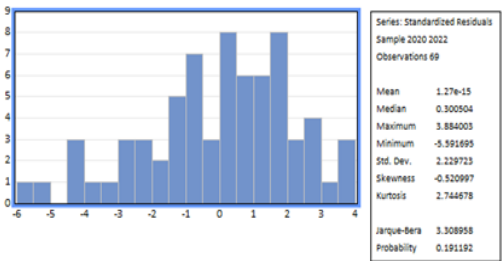
Statistik deskriptif menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh terhadap keempat variabel yang diteliti, yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK), tingkat pengangguran (TPT), ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), dan tingkat kriminalitas. Rata-rata PDRB ADHK sebesar 5.872,785 dengan standar deviasi 4.300,539, yang mencerminkan adanya disparitas ekonomi yang besar antar wilayah. Tingkat pengangguran di Aceh berkisar antara 1,10% hingga 11,50%, dengan rata-rata 5,33%, yang menunjukkan adanya perbedaan kondisi ketenagakerjaan yang cukup mencolok di masing-masing daerah. Sementara itu, ketimpangan pendapatan relatif rendah, dengan rata-rata Rasio Gini sebesar 0,288, yang menunjukkan distribusi pendapatan yang

cenderung merata. Tingkat kriminalitas juga mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan nilai minimum sebesar 78 kasus dan maksimum 550 kasus per 100.000 penduduk, serta rata-rata sebesar 216,72 kasus. Perbedaan yang tajam dalam tingkat kriminalitas antar kabupaten/kota selama periode penelitian mencerminkan adanya ketidakmerataan dalam tingkat keamanan di wilayah tersebut. Disparitas yang tinggi pada PDRB ADHK mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata di seluruh wilayah Aceh, yang berpotensi menciptakan ketimpangan pembangunan dan meningkatkan tekanan sosial-ekonomi antar daerah. Variasi yang besar pada tingkat pengangguran menunjukkan perbedaan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja, yang berkontribusi pada ketegangan sosial dan meningkatkan potensi tindakan kriminal. Meskipun ketimpangan pendapatan terbilang rendah secara keseluruhan, tingginya variasi angka kriminalitas menunjukkan bahwa faktor lain di luar distribusi pendapatan turut berperan dalam mendorong timbulnya kejahatan. Temuan awal ini mengindikasikan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki peranan yang lebih dominan dalam memengaruhi tingkat kriminalitas dibandingkan ketimpangan pendapatan, khususnya dalam konteks Provinsi Aceh.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	PDRB ADHK	TPT	RASIO GINI	KRIMINALITAS
Mean	5872.785	5.330435	0.288406	216.7246
Median	4345.780	5.100000	0.280000	195.0000
Maximum	17720.06	11.50000	0.390000	550.0000
Minimum	1122.890	1.100000	0.220000	78.00000
Std. Dev.	4300.539	1.928239	0.036040	116.0269

Sebelum melakukan regresi data panel, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan keabsahan model.



Gambar 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi terdistribusi normal, yang merupakan salah satu asumsi klasik dalam regresi linear. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan Jarque-Bera, yang dilakukan pada 69 observasi. Hasil uji menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 3,308958 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1912. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual model berdistribusi normal. Distribusi histogram residual menunjukkan pola yang simetris, menyerupai distribusi normal (bell-shaped). Nilai skewness sebesar -0,520997 dan kurtosis sebesar 2,744698 juga menunjukkan bahwa sebaran residual mendekati distribusi normal ideal, dengan nilai skewness mendekati 0 dan kurtosis mendekati 3. Dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi ini telah terpenuhi, yang mengindikasikan bahwa estimasi regresi dapat dianggap valid dari sisi distribusi residual. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ntamwiza (2020), yang menyatakan bahwa uji Jarque-Bera efektif dalam mendeteksi penyimpangan distribusi residual dalam regresi panel data, dan dapat dijadikan dasar dalam validasi model sebelum analisis lebih lanjut dilakukan. Selain itu, menurut Li (2024), distribusi residual yang normal memperkuat keandalan estimasi parameter dalam model Fixed Effects.

Tabel 2. Uji Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	315.2231	29.80063	10.57773	0.0000
PDRB ADHK	0.008248	0.002324	3.549525	0.0009
TPT	-26.03162	3.472559	-7.496379	0.0000
RASIO GINI	-28.35387	18.16987	-1.560488	0.1260
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999631	Mean dependent var	216.7246	
Adjusted R-squared	0.999416	S.D. dependent var	116.0269	
S.E. of regression	2.803955	Akaike info criterion	5.180656	
Sum squared resid	338.0731	Schwarz criterion	6.022493	
Log likelihood	-152.7326	Hannan-Quinn criter.	5.514641	
F-statistic	4655.683	Durbin-Watson stat	2.246307	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Nilai Durbin-Watson sebesar 2.2463 berada di antara DU dan 4-DU ($1.7015 < DW < 2.2985$), sehingga tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSRES				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/24/25 Time: 23:13				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 23				
Total panel (balanced) observations: 69				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18.77112	11.47239	-1.636200	0.1091
PDRB ADHK	0.001217	0.000895	1.360635	0.1807
TPT	2.360046	1.336836	1.765398	0.0846
RASIO GINI	2.899391	6.994879	0.414502	0.6806
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.568725	Mean dependent var	1.793297	
Adjusted R-squared	0.317984	S.D. dependent var	1.307080	
S.E. of regression	1.079442	Akaike info criterion	3.271483	
Sum squared resid	50.10341	Schwarz criterion	4.113320	
Log likelihood	-86.86616	Hannan-Quinn criter.	3.605468	
F-statistic	2.268174	Durbin-Watson stat	3.200424	
Prob(F-statistic)	0.008909			

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut: PDRB ADHK sebesar 0,1807, TPT sebesar 0,0846, dan Rasio Gini sebesar 0,6806. Karena seluruh nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Temuan ini konsisten dengan penelitian Niyongabo & Zhong (2023), yang menyatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Correlation	PDRB ADHK	TPT	RASIO GINI	KRIMINALITAS
PDRB ADHK	1.000000			
TPT	0.513088	1.000000		
RASIO GINI	0.117789	0.344052	1.000000	
KRIMINALITAS	0.941618	0.626835	0.228063	1.000000

Nilai korelasi antar variabel independen menunjukkan hubungan sebagai berikut: PDRB ADHK dan TPT sebesar 0,5131, PDRB ADHK dan Rasio Gini sebesar 0,1178, serta TPT dan Rasio Gini sebesar 0,3441. Karena seluruh nilai korelasi berada di bawah ambang batas 0,80, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi ini.

Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji Chow, LM, dan Hausman, model terbaik untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap tingkat kriminalitas adalah model *Fixed Effect* Model (FEM). Model ini mempertimbangkan perbedaan karakteristik spesifik setiap daerah

(cross-section), sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dibandingkan dengan model *Common Effect Model* (CEM) maupun *Random Effect Model* (REM).

Tabel 5. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	315.2231	29.80063	10.57773	0.0000
PDRB ADHK	0.008248	0.002324	3.549525	0.0009
TPT	-26.03162	3.472559	-7.496379	0.0000
RASIO GINI	-28.35387	18.16987	-1.560488	0.1260
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999631	Mean dependent var	216.7246	
Adjusted R-squared	0.999416	S.D. dependent var	116.0269	
S.E. of regression	2.803955	Akaike info criterion	5.180656	
Sum squared resid	338.0731	Schwarz criterion	6.022493	
Log likelihood	-152.7326	Hannan-Quinn criter.	5.514641	
F-statistic	4655.683	Durbin-Watson stat	2.246307	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Kesimpulan hasil estimasi regresi dengan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik (berdasarkan uji LM, Chow, dan Hausman) menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh. Model FEM dipilih karena mampu mempertimbangkan perbedaan karakteristik spesifik antar kabupaten/kota (*cross-section*), yang menghasilkan estimasi yang lebih akurat dibandingkan dengan model *Common Effect*

Model (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan PDRB per kapita, berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, ketidakmerataan distribusi pertumbuhan antara daerah dapat memperburuk ketegangan sosial dan meningkatkan tingkat kejahatan. Sebaliknya, tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, yang menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan angka kriminalitas, terutama jika ada dukungan sosial dari komunitas dan program pemerintah. Sementara itu, ketimpangan pendapatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Aceh, yang mengarah pada kesimpulan bahwa faktor-faktor sosial lain, seperti jaringan sosial dan budaya lokal, lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kejahatan dibandingkan ketimpangan ekonomi. Hasil ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana dinamika ekonomi dan sosial saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku kriminalitas, yang penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.

Tabel 6. Hasil Regresi FEM

Variabel Independen	Koefisien	Probabilitas	Interpretasi
C (Intercept)	315.2231	-	Konstanta model kriminalitas
PDRB ADHK	0.0082	0.0009	Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas
Tingkat Pengangguran (IPT)	-26.0316	0.0000	Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas
Rasio Gini	-28.3539	0.1260	Tidak signifikan secara statistik
R-squared	0.9996	-	99.96% variasi kriminalitas dijelaskan oleh model
F-statistic	4655.683	0.0000	Model signifikan secara simultan
Durbin-Watson Statistic	2.2463	-	Tidak terdapat autokorelasi

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas ($p = 0,0009$). Temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal (H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kriminalitas), yang sejalan dengan

penelitian Sari & Yulianto (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya mengurangi tingkat kriminalitas dengan meningkatkan peluang kerja. Namun, temuan ini dapat dijelaskan dengan teori bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperburuk kesenjangan sosial dan meningkatkan urbanisasi, yang menciptakan

lingkungan yang lebih rentan terhadap kejahatan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Syam & Alam (2024) yang menemukan bahwa peningkatan PDB per kapita sering kali dikaitkan dengan meningkatnya kejahatan properti dan ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas ($p = 0,0000$), yang bertentangan dengan hipotesis awal (H2: Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kriminalitas). Penelitian oleh Dariah (2024) menyatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi seharusnya meningkatkan kriminalitas, karena individu mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar. Namun, dalam konteks Aceh, hasil ini mungkin dapat dijelaskan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Dukungan sosial dan ekonomi dari keluarga di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, yang mengurangi insentif individu untuk melakukan kejahatan.
- 2) Program bantuan pemerintah yang efektif dalam mengurangi dampak negatif pengangguran terhadap tingkat kriminalitas.
- 3) Fenomena underemployment (setengah menganggur), yang memungkinkan individu tetap memperoleh penghasilan meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas ($p = 0,0009$). Temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal (H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kriminalitas), yang sejalan dengan penelitian Sari & Yulianto (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya mengurangi tingkat kriminalitas melalui peningkatan peluang kerja. Namun, hasil ini dapat dijelaskan melalui teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperburuk kesenjangan sosial dan meningkatkan urbanisasi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap kejahatan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Syam & Alam (2024), yang menemukan bahwa peningkatan PDB per kapita sering kali dikaitkan dengan meningkatnya kejahatan properti dan ekonomi.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas ($p = 0,0000$), yang bertentangan dengan hipotesis awal (H2: Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kriminalitas). Penelitian Dariah (2024) menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi seharusnya meningkatkan tingkat kriminalitas, mengingat individu mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar. Namun, dalam konteks Aceh, hasil ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Dukungan sosial dan ekonomi dari keluarga di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, yang mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan.
- 2) Program bantuan pemerintah yang efektif dalam mengurangi dampak negatif pengangguran terhadap tingkat kriminalitas.
- 3) Fenomena underemployment (setengah menganggur), yang memungkinkan individu tetap memperoleh penghasilan meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas ($p = 0,1260$), sehingga hipotesis H3 ditolak. Temuan ini bertentangan dengan teori ekonomi kriminal yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi akan meningkatkan kriminalitas karena ketidakadilan sosial (Layliya & Restikasari, 2024). Beberapa faktor yang dapat menjelaskan hasil ini antara lain:

- 1) Ketimpangan pendapatan yang relatif rendah di Aceh dibandingkan dengan daerah lain, sehingga tidak cukup memicu peningkatan kriminalitas.
- 2) Efektivitas penegakan hukum dan kebijakan sosial yang mampu mengurangi dampak negatif ketimpangan pendapatan terhadap kejahatan.
- 3) Dominasi faktor lain seperti pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, yang lebih signifikan dalam menjelaskan tingkat kriminalitas dibandingkan ketimpangan pendapatan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Armin & Idris (2020), Sugiharti *et al.* (2022, 2023), yang menemukan bahwa hubungan antara

ketimpangan pendapatan dan kriminalitas tidak selalu signifikan, terutama jika faktor sosial lainnya turut berperan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek, baik dari sisi teoretis, metodologis, maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini menunjukkan temuan yang berbeda dari teori dan penelitian sebelumnya, khususnya dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan tingkat kriminalitas. Temuan pertama yang menonjol adalah hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kriminalitas. Secara teoretis, pertumbuhan ekonomi semestinya menurunkan tingkat kriminalitas karena membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan peningkatan kriminalitas. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ditambah dengan dominasi sektor informal serta dampak urbanisasi yang cepat, dapat menciptakan ketidakstabilan sosial-ekonomi yang mendorong munculnya tindakan kriminal. Temuan kedua adalah hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan kriminalitas. Sebagian besar teori dan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi cenderung meningkatkan angka kriminalitas karena individu kehilangan penghasilan dan motivasi ekonomi untuk bertindak secara legal. Namun, penelitian ini menemukan sebaliknya, bahwa pengangguran justru berkorelasi negatif dan signifikan terhadap kriminalitas. Hal ini bisa dijelaskan oleh keberadaan faktor-faktor sosial seperti bantuan sosial, peran keluarga, budaya lokal yang kuat, serta dominasi aktivitas informal yang menopang kebutuhan hidup masyarakat tanpa keterlibatan dalam tindak kejahatan.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa hubungan antara pengangguran dan kriminalitas tidak bersifat universal dan harus dikaji dalam sosial-budaya masing-masing wilayah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas, yang bertentangan dengan asumsi

dalam teori disorganisasi sosial. Secara umum, teori tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula potensi terjadinya kriminalitas. Namun, dalam konteks Aceh, ketimpangan yang relatif rendah dan peran budaya serta kontrol sosial yang kuat tampaknya mampu meredam potensi efek negatif dari ketimpangan tersebut. Keterbaruan utama dari penelitian ini terletak pada pembuktian empiris bahwa pengaruh variabel ekonomi terhadap kriminalitas tidak selalu mengikuti pola teori klasik, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang khas seperti Aceh. Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dan melakukan perbandingan antara tiga model utama, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Melalui serangkaian uji pemilihan model seperti uji Chow, uji LM, dan uji Hausman, diperoleh bahwa FEM adalah model terbaik untuk menganalisis data ini. Artinya, perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Aceh berkontribusi signifikan terhadap variasi kriminalitas.

Temuan ini memiliki implikasi metodologis penting, bahwa studi-studi mengenai kriminalitas sebaiknya tidak hanya menggunakan pendekatan agregat atau makro, tetapi juga perlu memperhatikan keragaman spasial antar wilayah. Selain itu, penggunaan uji Hausman dan LM memberikan pembelajaran bahwa pemilihan model dalam studi panel tidak boleh dilakukan sembarangan, karena akan berdampak pada validitas hasil yang diperoleh. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan agar lebih berhati-hati dalam menafsirkan hubungan antara ekonomi dan kriminalitas. Misalnya, temuan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kriminalitas mengindikasikan pentingnya strategi pembangunan yang inklusif dan merata. Program-program seperti penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat miskin, dan dukungan bagi sektor informal perlu menjadi bagian dari strategi pertumbuhan untuk meminimalkan potensi gejolak sosial. Temuan bahwa pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan kriminalitas juga mengisyaratkan

bahwa fokus kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan tidak hanya pada jumlah pekerjaan, tetapi pada kualitas dan keberlanjutan pekerjaan itu sendiri. Pengembangan pelatihan kerja, peningkatan wirausaha, dan penciptaan lapangan kerja mandiri bisa menjadi strategi alternatif yang relevan. Lebih lanjut, karena ketimpangan pendapatan tidak signifikan dalam mendorong kriminalitas di Aceh, maka pendekatan pengendalian kriminalitas tidak cukup hanya mengandalkan strategi ekonomi, tetapi juga harus memperkuat dimensi sosial. Kebijakan berbasis nilai budaya lokal, peran keluarga, lembaga adat, dan penguatan solidaritas komunitas menjadi penting untuk diterapkan. Pemerintah daerah juga perlu mengadopsi pendekatan spasial dalam menyusun kebijakan kriminalitas, karena karakteristik tiap kabupaten/kota berbeda. Pendekatan yang terlalu umum atau seragam berisiko tidak efektif dan bahkan kontraproduktif jika diterapkan tanpa penyesuaian kontekstual. Selain memberikan pemahaman baru dalam dinamika kriminalitas, hasil penelitian ini juga memiliki kontribusi potensial dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh.

Hal ini dimungkinkan karena faktor-faktor yang dianalisis seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan merupakan komponen kunci dalam pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Pertama, temuan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak negatif jika tidak merata menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali arah kebijakan pembangunan. Pertumbuhan yang hanya terpusat di sektor atau wilayah tertentu berisiko memperluas jurang kesenjangan dan menciptakan ketegangan sosial. Oleh karena itu, hasil ini mendorong perlunya pendekatan pembangunan yang lebih adil dan inklusif, seperti pemberdayaan ekonomi desa, dukungan bagi UMKM, dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan pembangunan. Jika diterapkan, kebijakan ini tidak hanya menurunkan tingkat kriminalitas, tetapi juga secara langsung meningkatkan akses masyarakat terhadap pekerjaan, layanan dasar, dan stabilitas sosial, yang merupakan indikator

utama kualitas hidup. Kedua, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengangguran tidak selalu meningkatkan kriminalitas, membuka ruang bagi penguatan strategi sosial yang selama ini mungkin terabaikan. Dukungan sosial dari keluarga, komunitas, serta program bantuan pemerintah terbukti memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial meskipun tingkat pengangguran tinggi. Dengan demikian, penguatan jaringan sosial dan budaya lokal yang kuat dapat menjadi modal sosial yang penting dalam memperbaiki kualitas hidup. Kebijakan berbasis komunitas yang mendukung ketahanan keluarga, solidaritas sosial, dan kegiatan produktif informal akan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meskipun ketimpangan pendapatan tidak terbukti signifikan terhadap kriminalitas, hasil ini tetap mengindikasikan bahwa stabilitas sosial dapat dicapai meskipun terjadi ketimpangan relatif, asalkan diimbangi dengan sistem sosial yang kuat dan adil. Oleh karena itu, pemerintah tetap perlu menjaga distribusi pendapatan melalui sistem jaminan sosial, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi kelompok rentan. Upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan berdaya saing, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.

Terakhir, dengan pendekatan spasial melalui model Fixed Effect, penelitian ini menekankan bahwa karakteristik tiap kabupaten/kota berbeda dan harus dipahami secara kontekstual. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dan pengendalian kriminalitas harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap daerah. Pendekatan yang adaptif ini akan memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar menyentuh persoalan riil di masyarakat, meningkatkan efektivitas program, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara merata. Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan, yaitu menggunakan data selama tiga tahun (2020–2022) yang relatif singkat, tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial lainnya seperti pendidikan, struktur keluarga, atau migrasi penduduk, serta tidak melakukan klasifikasi jenis kriminalitas (misalnya: kriminalitas ekonomi, kekerasan, narkoba).

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengambil kebijakan:

- 1) Pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan merata agar tidak menciptakan potensi konflik sosial baru.
- 2) Strategi penanganan pengangguran tidak cukup hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan budaya lokal.
- 3) Distribusi pendapatan tetap perlu dipantau, meskipun tidak signifikan secara statistik, karena dalam jangka panjang bisa memicu keresahan sosial.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan dinamika sosial di Aceh, di mana peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) justru berkorelasi positif dan signifikan dengan angka kriminalitas. Temuan ini menantang asumsi konvensional yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan menurunkan tingkat kejahatan, dan menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan pemerataan dan keadilan sosial, potensi terjadinya konflik sosial justru meningkat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kemajuan ekonomi yang tidak inklusif dapat menciptakan ketimpangan dan tekanan sosial baru yang pada gilirannya mendorong peningkatan tindakan kriminal. Selain itu, korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan kriminalitas menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial seperti dukungan keluarga, budaya lokal, dan keberadaan sektor informal berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, bahkan di tengah tantangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat Aceh memiliki daya lenting terhadap potensi kriminalitas, meskipun dalam kerangka ekonomi yang tampak kontradiktif. Sementara itu, ketimpangan pendapatan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas memperkuat dugaan bahwa variabel sosial lain lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kejahatan di wilayah ini.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan, inklusi sosial, dan penguatan modal sosial masyarakat. Program-program pembangunan perlu diarahkan untuk memperkuat peran sektor informal, memperluas jangkauan bantuan sosial, serta mendorong partisipasi aktif komunitas lokal dalam perencanaan kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya akan berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, mengingat bahwa variabel ekonomi belum cukup menjelaskan variasi kriminalitas antar wilayah, penelitian ini membuka peluang untuk studi lanjutan yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor sosial lainnya. Variabel seperti tingkat pendidikan, efektivitas penegakan hukum, kepercayaan terhadap institusi, dan peran media sosial dapat menjadi fokus penelitian di masa depan. Selain itu, pendekatan spasial atau pemetaan geografis kejahatan dapat memberikan gambaran visual yang lebih presisi dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana dinamika ekonomi dan sosial saling berinteraksi dalam memengaruhi tingkat kriminalitas di Aceh, serta menawarkan arah kebijakan yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Aditama, M. R., & Ir, M. I. H. (2021). *Analisis Pengaruh Jumlah Pengangguran, Tingkat Inflasi, Pdrb Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kriminalitas Ekonomi Di 17 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Armin, F. (2020, March). Analysis of the effects of education, unemployment, poverty, and income inequality on crime in Indonesia. In *4th Padang International*

- Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEBA-2 2019)* (pp. 368-374). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.092>.
- Azis, F. Z., Hendrawati, T., Nafis, A. M., & Fattah, D. (2023). Analisis indeks pembangunan manusia provinsi Jawa Tengah menggunakan analisis regresi. *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 4(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.46306/lb.v4i2.374>.
- Chen, Y. (2016). Spatial autocorrelation approaches to testing residuals from least squares regression. *PloS one*, 11(1), e0146865.
- Chrisinta, D., Gelu, L. P., & Baso, B. (2022). Identifikasi Sebaran Karakteristik Kriminal di Indonesia Tahun 2021 Menggunakan Model-Based Clustering. *Journal of Mathematics, Computations and Statistics*, 5(2), 98-105.
- Dariah, A. R. (2024). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan Pengangguran terhadap Kriminalitas di Jakarta dan Jabar. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 109-116.
- Elías, J. J., Mulligan, C. B., & Murphy, K. M. (2019). Sample of the power of the economic approach. *Journal of Human Capital*, 13(2), 140–141. <https://doi.org/10.1086/703354>.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>.
- Hachica, E., & Triani, M. (2022). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 63. <https://doi.org/10.24036/ecosains.1181>
- 4857.00.
- Ikhsan, I. (2021). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 23-30.
- Kasim, F. S., & Hendra, H. (2023). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap tindakan kriminal di Kabupaten Tolitoli periode 2012-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 11–20. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i2.81>.
- Li, K. (2024). Analysis of the Spatial Heterogeneity of China's Sports Cultural Industry Investment Based on Panel Data. *Open Access Library Journal*, 11(5), 1-13. <https://doi.org/10.4236/oalib.1111562>.
- Maravina, T. A., & Martin, R. D. (2022). A Hausman type test for differences between least squares and robust time series factor model betas. *Journal of Mathematical Finance*, 12(02), 411–434. <https://doi.org/10.4236/jmf.2022.122023>.
- Niyongabo, C., & Zhong, T. (2023). Econometric analysis of the impact of unemployment on Burundi economic growth. *Journal of Service Science and Management*, 16(06), 711–724. <https://doi.org/10.4236/jssm.2023.166038>.
- Ntamwiza, J. M. V. (2020). Econometric analysis of transport sector on economic growth in Rwanda (1999-2018). *Journal of Transportation Technologies*, 10(04), 380–391. <https://doi.org/10.4236/jtts.2020.104024>.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165>.

- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123-131.
- Saputra, R. (2023). Analisis tingkat pendidikan, kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas di Bekasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(4), 159–163.
- Sari, T. N. S., & Yulianto, S. (2024). ANALISIS METODE SPASIAL UNTUK MENENTUKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KRIMINALITAS PADA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 289-301.
- Shen, D., Ding, P., Sekhon, J., & Yu, B. (2023). Same root different leaves: Time series and cross-sectional methods in panel data. *Econometrica*, 91(6), 2125–2154. <https://doi.org/10.3982/ECTA21248>.
- Sohil, F., Sohali, M. U., & Shabbir, J. (2022). An introduction to statistical learning with applications in R. *Statistical Theory and Related Fields*, 6(1), 87–87. <https://doi.org/10.1080/24754269.2021.1980261>.
- Stater, M., & Hoag, C. (2023). Including the instruments in the regression is the Hausman test. *Annals of Economics and Statistics*, (152), 43-64.
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Agustin, L., & Rohmawati, H. (2022). Criminality and income inequality in Indonesia. *Social Sciences*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/socsci11030142>.
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The nexus between crime rates, poverty, and income inequality: A case study of Indonesia. *Economies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/economies11020062>.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Syam, R., Alam, S., & Regina, R. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Property di Indonesia dengan Pendekatan Ekonomi. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 15(5).
- Wahyu, A. M., Anugrah, P. G., Danyalin, A. M., & Noorrizki, R. D. (2021). Ketimpangan ekonomi berdampak pada tingkat kriminalitas? Telaah dalam perspektif psikologi problematika sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 170-178. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35361>.